



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 45);

21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN 2024

WILAYAH	BULAN												
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
IRBANWIL I	Reviu DAK (1 Tim)	Reviu Laporan Keuangan SKPD 2023 (1 Tim)	Reviu Laporan Kinerja (LKJ) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 (1 Tim)	Probitas Audit Tahun 2024 (1 Tim)	Pemeriksaan Ketaatan di BPBD Kota Banjarmasin (1 Tim)	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2024 (1 Tim)	Reviu DAK (1 Tim)	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS Semester 1 TA 2024 (2 Tim)	Reviu Rancangan RKA SKPD Perubahan TA 2024 (1 Tim)	Pemeriksaan Kinerja di PD PAL Banjarmasin (1 Tim)	Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (1 Tim)	Reviu DAK (1 Tim)	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bos Semester 2 (2 Tim)	Reviu Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemko Banjarmasin Tahun 2023 (1 Tim)			Reviu Rancangan Akhir RKPDP 2025 (1 Tim)	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2024 (1 Tim)		Reviu RKA SKPD TA 2025 (1 Tim)		Pemeriksaan Pencapaian SPM di Satpol PP Kota Banjarmasin (1 Tim)		Pemeriksaan Kinerja di PT. Air Minum Bandarmasih (Persero) (1 Tim)	
			Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023 (1 Tim)	Pemeriksaan Ketaatan di Satpol PP Kota Banjarmasin (1 Tim)				Pemeriksaan Ketaatan di Bagian Hukum Sekretariat Kota Banjarmasin (1 Tim)	Reviu Rancangan Renja Perubahan SKPD 2024 (1 Tim)	Pemeriksaan Ketaatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin (1 Tim)		Pemeriksaan Pencapaian SPM di BPBD Kota Banjarmasin (1 Tim)	
		Pemeriksaan Ketaatan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (1 Tim)				Pemeriksaan Pencapaian SPM di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin (1 Tim)					Reviu DAK (1 Tim)		Penutupan Kas Akhir Tahun 2024 (1 Tim)
IRBANWIL II	Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023	Audit Ketaatan Program Kepegawaian Daerah (BKD, Diklat)	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2022 (Tim I)	Audit Kinerja Bidang P3K Dinas Koperasi UMTK	Audit Ketaatan Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Perlindungan Perempuan DP3A	Reviu Renja SKPD Tahun 2025 (Tim I)	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan (MCP KPK)	Reviu RKA Perubahan 2024 (Tim I)	Reviu RKA 2025 (Tim I)	Audit Ketaatan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Disperdagin	Audit Kinerja Program Penanganan Stunting DPPKBPM	Audit Ketaatan Dana Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan	

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBANWIL II	Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023	Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemko Banjarmasin TA 2023 (Tim I)	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2022 (Tim II)	Audit Kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Dinas Perindustrian	Audit Ketaatan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Bidang Penanaman Modal	Reviu Renja SKPD Tahun 2025 (Tim II)	Reviu Manajemen ASN (MCP KPK)	Reviu RKA Perubahan 2024 (Tim I)	Reviu RKA 2025 (Tim I)	Audit Ketaatan Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi UMTK	Audit Kinerja Program Pengendalian Inflasi Daerah Disperdagin	Audit Ketaatan Dana Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Barat
	Audit Ketaatan Dana Kelurahan TA 2023 Kecamatan Banjarmasin Utara										Pengawasan F3DN Disperdagin	Reviu DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana TA 2024
	Audit Ketaatan Dana Kelurahan TA 2023 Kecamatan Banjarmasin Timur											
IRBANWIL III	Stock Opname Persediaan Akhir Tahun Anggaran 2023 SKPD	Reviu Laporan Keuangan SKPD TA 2023	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023	Monitoring Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I	Reviu KUA PPAS TA 2025	Reviu Rarhir Renja Perubahan 2024	Reviu RKA Perubahan TA 2024	Reviu RKA TA 2025	Reviu RKA TA 2024	Reviu DAK 2024	Audit Ketaatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Monitoring Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV
	Reviu DAK TA 2023	Audit Ketaatan Dinas Lingkungan Hidup	Reviu Laporan Keuangan Pemko TA 2023	Probit Audit DPRKP	Audit Kinerja Dinas Perhubungan	Reviu Rarhir Renja 2025	Reviu KUPA-PPASP TA 2024	Audit Ketaatan BPKPAD	Reviu DAK 2024	Monitoring Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III	Audit Ketaatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Reviu DAK 2024
			Probit Audit Dinas Kesehatan				Monitoring Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II					

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBANSUS	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survey Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi LHKAN SPT Tahunan	Monitoring dan Evaluasi LHKPN	Monitoring dan Evaluasi LHKAN SPT Tahunan	Pendampingan Zona Integritas	Sosialisasi SPI dan Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Survey SPI	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI	Sosialisasi Saber Pungli dan Gratifikasi	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI
		Monitoring dan Evaluasi PMPRB Ex-Ante		Monitoring dan Evaluasi PMPRB On-Going		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Saber Pungli	Monitoring dan Evaluasi PMPRB On-Going			Monitoring dan Evaluasi PMPRB On-Going	Monitoring dan Evaluasi LHKPN	
	-----TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA APIP DAN APH -----											
SEKRETARIAT	----- Pengawasan Penanganan Laporan Pengaduan (Wistleblowing System), Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit ----- Monitoring											

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA